

**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
DI KOTA TANGERANG**

Hesti Hesti, Tb. Yudi Muhtadi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf
hesti@unis.ac.id, tubagusyudi@unis.ac.id

Abstract

Development programs implemented in Indonesia and around the world have had an impact on economic and social growth which is part of the nation and state development process. The economic growth that occurs as a result of the development process also has an impact on economically weak groups with the emergence of urbanization from villages to cities, especially among economically weak groups including street children, homeless people, beggars and buskers due to their inability to compete and the weakness of their human resources and the lack of open access. employment opportunities for them. In the context of the Constitution, Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution states that the poor and neglected children are cared for by the State. The Tangerang City Government, as one of the cities that has an impact on the flow of urbanization, has very good attention in the development and empowerment of children. street children, homeless people, beggars and buskers with the enactment of Regional Regulation number 5 of 2012 concerning the development of street children, homeless people, beggars and buskers where this regional regulation aims to ensure that street children, homeless people, beggars and buskers can live with dignity and benefit. Seeing the above, the researcher would like to made a positive contribution by conducting research "Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning the Development of Street Children, Homeless People, Beggars and Buskers in the City of Tangerang using a theoretical approach to the policy implementation model from Merillee S. Grindle. The success of policy implementation is largely determined by the level of implementability of the policy itself, namely Content of Policy and Context of Policy, Grindle (1980). The aim of this research is to determine the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning the Development of homeless street children, beggars and buskers. From The results of this research are that the implementation of regional regulation number 5 of 2012 concerning the development of street children, homeless people, beggars and buskers has gone well but there are several things that must be optimized, namely the role of the community, the private sector, universities in the development and empowerment program. The impact of the implementation of this regional regulation. reducing the number of street children, homeless people, beggars and buskers who are active on the streets

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Street Children, Homeless, Beggars, Buskers

Abstrak

Program pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia maupun di dunia telah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian dari proses pembangunan bangsa dan bernegara. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat dari proses pembangunan juga berdampak pada golongan ekonomi lemah dengan munculnya arus urbanisasi dari desa ke Kota terutama pada kalangan ekonomi lemah diantaranya anak jalan, gelandang, pengemis dan pengamen akibat tidak mampu bersaing serta lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki serta belum terbukanya lapangan kerja untuk mereka. Dalam Kontek Konstitusi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah satu Kota yang berdampak pada arus urbanisasi mempunyai perhatian yang sangat baik dalam Pembinaan dan Pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan dibuatnya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dimana perda ini bertujuan agar anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dapat hidup bermartabat dan bermanfaat. Melihat hal tersebut di atas, peneliti ingin memberikan kontribusi positif dengan melakukan penelitian “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang melalui pendekatan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle (1980). Tujuan dan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan gelandang, pengemis dan pengamen. Dari hasil penelitian ini implementasi perda nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sudah berjalan dengan baik tetapi ada beberapa yang harus di optimalkan yaitu peranan masyarakat, sektor swasta, Perguruan tinggi dalam program pembinaan dan pemberdayaan. Dampak dari Implementasi perda ini berkurangnya jumlah anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen yang beraktifitas di jalanan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara telah banyak memberikan dampak pada kehidupan masyarakat tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi tetapi juga berdampak pada sosial kehidupan masyarakat baik itu kalangan masyarakat atas, masyarakat menengah maupun pada masyarakat golongan bawah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan melalui dukungan seluruh *stakeholder* merupakan kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

pusat maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selain telah membawa dampak yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat tetapi pembangunan juga telah menimbulkan arus urbanisasi yang menimbulkan permasalahan baru diantaranya kehadiran Gelandang Pengemis, anak jalanan serta pengamen di Kota besar. Kehadiran mereka harus menjadi perhatian oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara. Untuk itu Pembinaan bagi mereka harus menjadi perhatian dan komitmen bersama agar mereka mendapat kehidupan dengan baik bermartabat dan bermanfaat melalui kerjasama seluruh *stakeholder*.

Kota Tangerang sebagai Kota yang berdampak pada arus urbanisasi mempunyai komitmen yang sangat baik dalam penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen dengan tujuan agar mereka memiliki kehidupan bermartabat dan bermanfaat.

Untuk melaksanakan Perda tersebut Pemerintah Kota Tangerang telah memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas sosial Kota Tangerang untuk menangani persoalan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang. Selain Dinas Sosial, ada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan Peraturan Daerah. Maka, Dinas Sosial Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berkeajiban menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

Berdasarkan latar belakang ini peneliti mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menganalisis ‘Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pegemis

dan Pengamen di Kota Tangerang’, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Metode Penelitian Kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sedangkan Pendapat lain diantaranya Erickson (1968) dalam (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ahli berkaitan dengan definisi Penelitian kualitatif, bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena di lokasi yang menjadi fokus dan lokasi penelitian dengan menggunakan metode yang ada serta teknik yang digunakan dengan menggambarkan secara naratif.

Dalam melakukan Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pegemis dan Pengamen di Kota Tangerang, Peneliti akan melakukan penelitian ini dengan melakukan Observasi, Wawancara, Studi literatur serta menganalisis fenomena yang terjadi dengan pendekatan teori dan hasilnya berupa gambaran secara deskriptif naratif.

C. PEMBAHASAN

a) *Content of Policy* :

- 1) Jenis manfaat yang dihasilkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang telah

memberikan manfaat dengan berkurangnya jumlah anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang dalam mewujudkan Kota Tangerang yang tertib dan aman serta memberikan kehidupan yang layak bagi para penyandang sosial melalui pembinaan dan pemberdayaan.

2) Derajat perubahan

Derajat perubahan pada implementasi kebijakan ini yaitu merubah cara berpikir anak-anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen agar mereka tidak lagi melakukan aktivitas di jalan, tetapi mereka dapat hidup layak dengan melakukan aktifitas usaha maupun hobi ditempat yang seharusnya. Dengan demikian derajat yang dicapai yaitu bagaimana Kota Tangerang sebagai Kota Tangerang yang bebas dari anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen yang beraktifitas di jalanan.

3) Kepentingan yang mempengaruhi

Sebuah kebijakan akan baik ketika kebijakan itu dipengaruhi oleh Kepentingan yang mempengaruhi yaitu para *Stakeholder* yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, Sektor Swasta maupun Perguruan Tinggi harus mampu mempengaruhi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dengan penegakan aturan secara baik mulai dari Pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi serta Pembinaan. Berkaitan dengan peran masyarakat, masyarakat harus ikut mendukung dan ikut partisipasi dalam penegakan perda ini begitu juga dengan sektor Swasta dan Perguruan Tinggi harus ikut partisipasi dalam Pembinaan dan pemberdayaan.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dalam implementasi Perda ini terletak sampai sejauh mana sanksi dan teguran kepada pihak-pihak yang melanggar perda ini,

untuk itu aparat yang mempunyai tugas dan fungsi pada penegakan perda ini harus tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

5) Sumber Daya yang dihasilkan

Implementasi sebuah kebijakan akan berhasil ketika adanya dukungan sumber daya dalam penegakan perda ini pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana, walaupun dalam hal sarana pembinaan seperti rumah singgah dan sarana untuk program pembinaan perlu dioptimalkan.

b. Context of policy

1) Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang terlibat

Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang terlibat, dimana Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuasaan harus melakukan koordinasi dengan semua aktor yang terlibat terutama tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, sektor swasta maupun media agar perda ini berjalan optimal

2) Karakteristik Lembaga dan aktor yang berkuasa

Karakteristik Lembaga dan aktor yang terlibat akan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Tangerang memiliki karakter yang responsif dan partisipatif serta akomodatif serta aktor yang berkuasa memiliki perhatian yang baik dalam implementasi perda hal ini bisa dilihat dari proses penegakan perda.

3) Kepatuhan dan respon dari Pelaksana.

Berkaitan dengan Kepatuhan dan respon dari Implementasi Perda ini harus terus ditingkatkan hal ini untuk mengatasi kendala yang ada diantaranya masih ada beberapa anak jalanan, pengamen dan pengemis yang masih turun ke

jalan, dengan cara melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi secara berkesinambungan serta membuat program program pembinaan dan pemberdayaan agar mereka dapat memiliki hidup yang layak di tempat yang seharusnya.

D. SIMPULAN

Penelitian yang menfokuskan pada “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang dengan menggunakan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980) dimana keberhasilan implementasi kebijakan yang ditentukan oleh *Content of Policy* dan *Context of Policy* dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang dengan tujuan memberikan kehidupan bermartabat dan bermanfaat bagi anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengemis sudah berjalan dengan baik. Dalam konteks manfaat implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif dengan berkurangnya anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang hal disebabkan adanya karakter rezim yang berkuasa memiliki komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebagai aktor utama dalam implementasi Perda dengan menyiapkan sumber daya yang memadai.

Berkaitan Kepentingan aktor yang terlibat peranan *stakeholder* yaitu Pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, sektor swasta dan media harus terus diperkuat dalam pembinaan dan Program Pemberdayaan, dengan adanya partisipasi semua stakeholder akan mampu memberikan hal terbaik untuk Kota Tangerang dalam Pembinaan dan Pemberdayaan anak jalanan, gelandang, pengemis dan Pengamen

terutama dalam Pengawasan Monitoring dan Evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M.B, dan Huberman, A.M. 2009. *Aanalisis Data Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Olsen, W. 2004. *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed*. Dalam M. Holborn, Ormskirk (Eds) *Development in Sociology*. New York: Causeway Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, A.S. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Kebijakan-Kebijakan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen